

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai utara Jawa (Pantura). Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.002,23 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan 286 desa dan kelurahan, terdiri atas 266 desa dan 20 kelurahan. Selain itu, terdapat pula 1.139 dukuh, 1.461 RW, serta 6.351 RT yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kendal berada pada koordinat 109°40' – 110°18' Bujur Timur dan 6°32' – 7°24' Lintang Selatan, yang menjadikannya berposisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi menjadi tiga zona, yaitu dataran rendah di bagian utara, wilayah perbukitan di bagian tengah, serta pegunungan di bagian selatan. Kondisi ini membuat Kendal memiliki variasi ketinggian mulai dari 0 hingga lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Misalnya, Kecamatan Plantungan terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 697 mdpl, sedangkan Kecamatan Kaliwungu berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 22 MDPL. Perbedaan topografi tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi iklim, tetapi juga pemanfaatan lahan, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga kawasan industri.

Selain dikenal sebagai daerah agraris dengan dominasi sektor pertanian dan perikanan, Kendal juga berkembang sebagai kawasan industri. Sejak tahun 2016,

pemerintah telah menetapkan Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan pada tahun 2019 kawasan ini dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 dengan luas awal 2.200 hektare. Kehadiran KEK menjadikan Kendal bukan hanya pusat produksi agraris, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik investasi berskala nasional maupun internasional.

Adapun batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Timur : Kota Semarang
- c. Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- d. Barat : Kabupaten Batang

Posisi ini semakin menegaskan peran strategis Kendal sebagai penghubung jalur perdagangan, transportasi, dan mobilitas penduduk di kawasan Pantura Jawa.

### **2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi**

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sekitar 1.002,23 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 kecamatan, terdiri atas 266 desa dan 20 kelurahan. Selain itu, wilayah administrasi di Kabupaten Kendal masih mencakup 1.139 dukuh, 1.461 RW, dan 6.351 RT. Secara geografis, wilayah Kendal berada pada koordinat 109°40' – 110°18' Bujur Timur dan 6°32' – 7°24' Lintang Selatan, serta menempati posisi strategis di jalur Pantura yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Tengah.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai pembagian wilayah administratif, berikut disajikan data luas area dan ketinggian masing-masing kecamatan di Kabupaten Kendal:

**Tabel 2. 1 Luas dan Wilayah Administratif**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Area (km<sup>2</sup>/sq.km)</b>	<b>Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (ma.s.l)</b>
1	PLANTUNGAN	48.82	697.992
2	SUKOREJO	76.01	542.256
3	PAGERUYUNG	514.3	414.004
4	PATEAN	92.94	394.411
5	SINGOROJO	119.32	219.151
6	LIMBANGAN	71.72	591.617
7	BOJA	64.09	287.56
8	KALIWUNGU	47.73	22.555
9	KALIWUNGU SELATAN	65.19	85.344
10	BRANGSONG	34.54	7.01
11	PEGANDON	32.12	17.069
12	NGAMPEL	33.88	13.106
13	GEMUH	38.17	12.192
14	RINGINARUM	23.5	21.336
15	WELERI	30.28	4.877

No	Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (ma.s.l)
16	ROWOSARI	32.64	8.23
17	KANGKUNG	38.98	7.925
18	CEPIRING	30.08	10.668
19	PATEBON	44.3	10.973
20	KOTA KENDAL	27.49	7.925

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

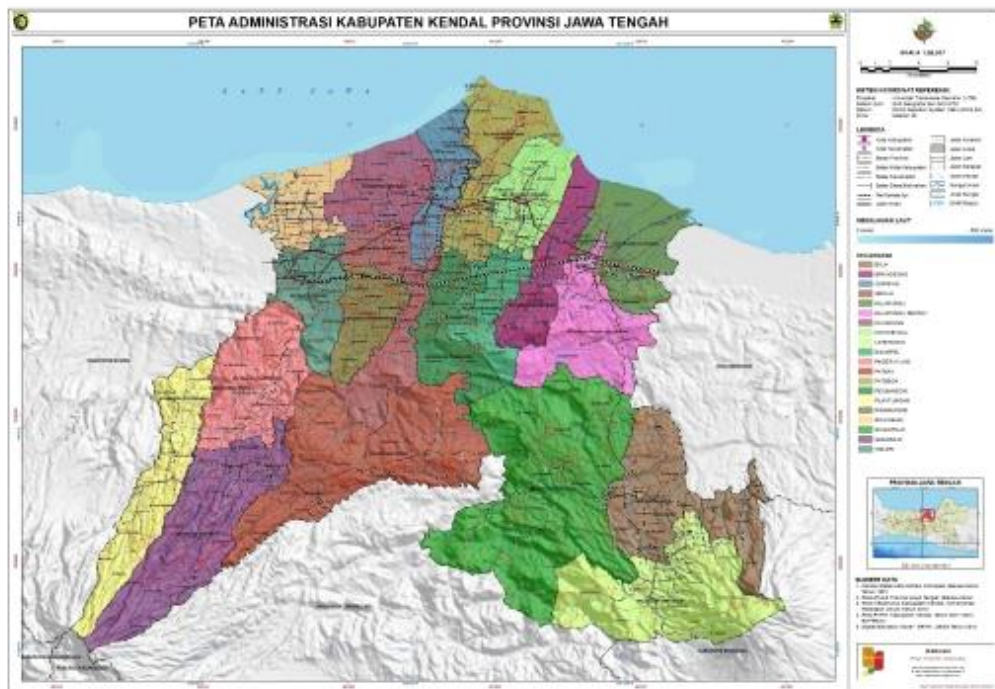
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Singorojo merupakan wilayah terluas dengan luas 119,32 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Ringinarum adalah yang terkecil dengan luas hanya 23,50 km<sup>2</sup>. Dari sisi ketinggian, Kecamatan Plantungan berada di dataran tinggi dengan 697 mdpl, sementara Kecamatan Brangsong, Kota Kendal, dan sekitarnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang dari 10 mdpl. Perbedaan ketinggian ini berpengaruh langsung terhadap suhu udara, iklim lokal, serta pola pemanfaatan lahan.

Kecamatan-kecamatan di bagian selatan yang berada pada ketinggian di atas 500 mdpl, seperti Plantungan, Sukorejo, dan Limbangan, cenderung lebih potensial untuk sektor perkebunan, hortikultura, serta wisata alam karena kondisi lingkungannya yang lebih sejuk. Sebaliknya, wilayah utara seperti Brangsong, Patebon, dan Kaliwungu yang berada di dataran rendah lebih berkembang dalam bidang perikanan, industri, dan perdagangan. Adapun kecamatan di wilayah tengah

seperti Boja dan Gemuh menjadi kawasan transisi yang mendukung sektor pertanian sekaligus akses transportasi karena berada di jalur penghubung.

Selanjutnya, untuk memperjelas gambaran wilayah, ditampilkan Peta Administratif Kabupaten Kendal pada Gambar 2.1. Peta ini menggambarkan batas wilayah, posisi kecamatan, serta karakter geografis Kendal yang terbentang dari pesisir pantai utara hingga kawasan pegunungan di bagian selatan.

**Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Kendal**



Peta administratif Kabupaten Kendal berikut memberikan gambaran visual mengenai pembagian wilayah setiap kecamatan beserta batas-batasnya. Dari peta ini terlihat dengan jelas perbedaan kondisi wilayah, mulai dari daerah pesisir di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, hingga kawasan pegunungan di bagian selatan yang bersentuhan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Posisi Kendal yang berada di jalur Pantura juga semakin

menegaskan perannya sebagai daerah strategis dalam arus transportasi dan perdagangan. Keberadaan peta administratif ini penting untuk memahami konteks geografis dan tata wilayah Kabupaten Kendal, sehingga dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut mengenai potensi, permasalahan, maupun kebijakan pembangunan daerah.

### 2.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Kendal dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduknya setiap tahun. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kendal terus mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang bervariasi. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada periode 2017 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2017-2024**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Laki-laki</b>	500,188	500,446	511,537	514,795	517,987	531,754	530,940	536,543
<b>Perempuan</b>	478,484	491,240	500,402	503,710	507,033	521,646	521,890	528,269
<b>Jumlah</b>	978,672	991,686	1,011,939	1,018,505	1,025,020	1,053,400	1,052,830	1,064,812

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2017 tercatat sebanyak 978.672 jiwa, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.064.812 jiwa pada tahun 2024. Jika dirinci menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki secara konsisten lebih banyak dibanding perempuan, meskipun

selisihnya relatif kecil. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 536.543 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 528.269 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Kendal relatif seimbang, dengan *sex ratio* yang tidak berbeda jauh dari angka ideal.

Selain pertumbuhan jumlah penduduk, struktur umur juga menjadi aspek penting dalam menganalisis kondisi demografi. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin memberikan gambaran mengenai komposisi usia produktif maupun non-produktif di Kabupaten Kendal. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahu 2024**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Perempuan) (Ribu)</b>	<b>Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)</b>
0-4	39334	37805	77139
5-9	38119	36585	74704
10-14	40341	38504	78845
15-19	39876	37743	77619
20-24	40554	38091	78645
25-29	41112	39356	80468
30-34	43903	42171	86074
35-39	44496	42489	86985
40-44	40203	39704	79907
45-49	37352	37931	75283
50-54	32900	34669	67569
55-59	31095	32284	63379
60-64	26167	26359	52526
65-69	19954	20325	40279

70-74	12454	13047	25501
75+	8683	11206	19889
<b>Jumlah/Total</b>	<b>536543</b>	<b>528269</b>	<b>1064812</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) merupakan mayoritas dengan jumlah lebih dari 700 ribu jiwa, sedangkan kelompok usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) jumlahnya lebih kecil. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 30–39 tahun dengan total sekitar 173 ribu jiwa, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas dengan hanya sekitar 19 ribu jiwa. Komposisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal berada pada fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menuntut perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

## **2.2 Fenomena Tawuran Pelajar di Kabupaten Kendal**

Kabupaten Kendal selama ini dikenal dengan julukan “Kota Santri” yang merepresentasikan kuatnya tradisi keagamaan serta keberadaan pondok pesantren di berbagai wilayah, khususnya di Kecamatan Kaliwungu. Identitas tersebut tidak hanya hidup dalam narasi budaya, tetapi juga menjadi bagian dari konstruksi sosial masyarakat Kendal yang dikenal religius dan memiliki banyak tokoh ulama. Representasi tersebut bahkan terekam dalam lagu “Kota Santri” yang menggambarkan suasana kehidupan santri dan nilai-nilai keislaman yang kental.

Namun dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial yang cukup kontras dengan citra tersebut, yakni meningkatnya tawuran pelajar dan aktivitas kelompok remaja yang terorganisir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berdampak pada rasa aman dan persepsi publik terhadap situasi keamanan wilayah.

Fenomena tawuran pelajar di Kabupaten Kendal tidak lagi bersifat insidental atau spontan semata, melainkan menunjukkan pola yang relatif berulang dan terstruktur. Remaja yang terlibat berada pada rentang usia 13 hingga 20 tahun, mencakup pelajar SMP, SMA/SMK, serta sebagian pemuda yang telah lulus sekolah. Latar belakang sosial mereka pun beragam, sehingga fenomena ini tidak dapat dilekatkan pada satu kelompok sosial tertentu. Tawuran tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga menyebar ke beberapa kecamatan dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tawuran pelajar telah menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian secara komprehensif.

### **2.2.1 Karakteristik Sosial Tawuran Pelajar**

#### **a. Rentang Usia dan Latar Belakang Pelaku**

Remaja yang terlibat dalam tawuran pelajar di Kabupaten Kendal umumnya berada pada fase perkembangan psikososial yang masih labil dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Usia 13–20 tahun merupakan masa pencarian identitas yang ditandai dengan kebutuhan akan pengakuan kelompok sebaya. Dalam konteks ini, keterlibatan dalam kelompok tawuran seringkali dipandang sebagai bentuk solidaritas dan eksistensi diri. Latar belakang pelaku yang beragam menunjukkan bahwa fenomena ini tidak

hanya berkaitan dengan faktor ekonomi atau status sosial tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tawuran pelajar merupakan persoalan lintas latar belakang yang bersifat kolektif.

#### **b. Pola Organisasi dan Identitas Kelompok**

Pembentukan kelompok remaja yang terlibat tawuran menunjukkan kecenderungan semi-terstruktur, dengan penggunaan nama kelompok, atribut pakaian, serta simbol tertentu sebagai identitas. Keanggotaan tidak lagi sepenuhnya berbasis kesamaan sekolah atau wilayah tempat tinggal, melainkan lebih fleksibel dan terbuka. Identitas kelompok berfungsi memperkuat solidaritas internal serta membedakan diri dari kelompok lain. Dalam beberapa kasus, kelompok memiliki pola komunikasi internal yang terorganisir melalui media sosial atau aplikasi pesan. Pola ini menunjukkan bahwa tawuran tidak lagi sekadar konflik antar individu, tetapi telah berkembang menjadi konflik antar kelompok yang memiliki kesadaran kolektif.

#### **c. Pemanfaatan Media Sosial**

Media sosial seperti TikTok dan Instagram digunakan sebagai sarana eksistensi sekaligus komunikasi antar kelompok. Platform tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menampilkan aktivitas kelompok, tetapi juga untuk menyampaikan tantangan kepada kelompok lain secara terbuka. Dalam beberapa peristiwa, aksi tawuran bahkan disiarkan secara langsung sehingga memperluas eksposur konflik ke ruang publik digital. Keberadaan media sosial mempercepat proses mobilisasi dan memperluas jangkauan

komunikasi antar kelompok. Dengan demikian, konflik pelajar di Kendal memiliki dimensi digital yang turut mempengaruhi eskalasi peristiwa.

### **2.2.2 Pemetaan Wilayah Rawan Tawuran Pelajar**

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa titik yang secara umum teridentifikasi sebagai wilayah rawan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal, yaitu:

1. Tanah Abang (ikut Desa Pagerdawung, Kecamatan Ringinarum)
2. Jalan Pantura Ungup–Ungup (ikut Desa Wonotenggang, Kecamatan Rowosari)
3. Jalan Lingkar Weleri
4. Jalan Lingkar Kaliwungu
5. Jalan Tembus Purin (ikut Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon)
6. Perempatan Bawuk (ikut Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel)

Lokasi-lokasi tersebut umumnya berupa jalan lingkar, jalur alternatif, atau perempatan dengan akses mobilitas tinggi. Karakteristik geografis ini memungkinkan kelompok berkumpul dalam jumlah besar serta membubarkan diri dengan cepat ketika situasi tidak kondusif. Minimnya pengawasan langsung masyarakat pada malam hari di beberapa titik tersebut turut meningkatkan potensi terjadinya konflik. Selain itu, sebagian lokasi berada pada titik pertemuan antar wilayah sehingga memudahkan konsolidasi kelompok dari kecamatan berbeda. Pemetaan wilayah ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi tawuran tidak bersifat acak, melainkan mempertimbangkan faktor strategis dan aksesibilitas.

### 2.2.3 Sekolah yang Teridentifikasi Rawan

Beberapa sekolah yang secara umum teridentifikasi memiliki potensi kerawanan konflik pelajar antara lain:

1. SMK Harapan Mulya
2. SMK Bina Utama
3. SMK Muhammadiyah 3 Kendal
4. SMK N 3 Kendal
5. SMA N 2 Kendal
6. SMA N 1 Gemuh
7. SMK NU 01 Kendal
8. SMA Al Hidayah Kendal
9. SMK Bhineka
10. SMK N 2 Kendal
11. SMP N 1 Gemuh
12. SMP N 2 Gemuh
13. SMP N 3 Patebon
14. SMP N 3 Kendal
15. SMP N 1 Kendal
16. MTs N 2 Kendal
17. SMP NU Al Hidayah
18. MTs NU 03 Al Hidayah
19. MTs NU 19 Protomulyo
20. SMP N 4 Cepiring
21. SMK Adhi Yudya Karya Patean

Daftar tersebut mencerminkan bahwa potensi kerawanan tidak terbatas pada satu jenjang pendidikan atau status sekolah tertentu. Kerawanan yang dimaksud berkaitan dengan kemungkinan keterlibatan

sebagian siswa dalam dinamika konflik antar kelompok. Fakta bahwa sekolah yang teridentifikasi berasal dari berbagai tipe menunjukkan bahwa fenomena tawuran pelajar bersifat lintas institusi. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai permasalahan internal satu sekolah saja.

#### **2.2.4 Periode dan Momentum Rawan Tawuran**

Adapun periode dan momentum yang secara umum teridentifikasi rawan terjadinya tawuran pelajar adalah sebagai berikut:

- a. Jumat malam hingga dini hari
- b. Sabtu malam hingga dini hari
- c. Hari libur
- d. Ngabuburit menjelang berbuka puasa
- e. Menjelang sahur
- f. Saat telah terjadi kesepakatan tantangan antar kelompok

Pola waktu tersebut menunjukkan bahwa konflik lebih sering terjadi pada periode ketika aktivitas formal sekolah tidak berlangsung dan kontrol sosial relatif menurun. Malam akhir pekan memberikan ruang berkumpul yang lebih longgar bagi remaja sehingga memudahkan konsolidasi kelompok. Momentum Ramadan, yang seharusnya identik dengan aktivitas religius, dalam beberapa kasus justru menjadi celah pertemuan kelompok pada waktu menjelang sahur. Selain itu, adanya kesepakatan tantangan melalui media sosial menunjukkan bahwa sebagian tawuran telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, dimensi waktu memiliki keterkaitan erat dengan pola aktivitas remaja dan dinamika komunikasi kelompok.

## **2.3 Gambaran Umum Instansi**

Sebagai salah satu unsur pelaksana kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polres Kendal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kendal. Kedudukan Polres berada langsung di bawah Polda Jawa Tengah dengan tugas utama melaksanakan fungsi Polri dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Letak geografis Kabupaten Kendal yang berada di jalur Pantura menjadikan wilayah ini sebagai kawasan yang strategis, sekaligus rawan terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan, termasuk tindak kriminalitas maupun potensi konflik sosial. Oleh karena itu, keberadaan Polres Kendal memiliki arti strategis, tidak hanya bagi masyarakat Kendal, tetapi juga bagi stabilitas keamanan di Jawa Tengah bagian utara.

### **2.3.1 Polres Kendal**

Polres Kendal merupakan lembaga kepolisian tingkat kabupaten yang membawahi seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Sejarah pembentukannya dimulai sejak masa awal kemerdekaan ketika masih bernama Polisi Kabupaten Kendal dengan membawahi empat detasemen dan dua belas subdetasemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958, statusnya kemudian berubah menjadi Komando Resort (Komres) Kendal. Sejak tahun 1984, penamaannya resmi menjadi Polres Kendal hingga saat ini. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa Polres Kendal merupakan institusi yang telah lama mengakar dalam struktur

keamanan daerah dan terus bertransformasi mengikuti perkembangan organisasi Polri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Kendal memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi Polri, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Kondisi wilayah Kendal yang cukup luas dan beragam, mulai dari kawasan industri di utara hingga wilayah pegunungan di selatan, menuntut Polres Kendal untuk memiliki strategi pengamanan yang adaptif. Selain itu, dengan posisinya sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, Polres Kendal juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan regional agar tidak berdampak pada wilayah sekitarnya.

### **2.3.2 Wilayah Hukum Polres Kendal**

Wilayah hukum Polres Kendal meliputi seluruh Kabupaten Kendal dengan luas sekitar 1.002,23 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 20 kecamatan. Namun, Polres Kendal hingga tahun 2022 baru membawahi 17 Polsek, sehingga terdapat beberapa Polsek yang menangani lebih dari satu kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam penyebaran personel dan penguatan pelayanan kepolisian di wilayah yang cukup luas. Dengan cakupan tersebut, Polres Kendal tidak hanya bertugas di wilayah perkotaan seperti Kendal Kota, tetapi juga mencakup daerah pesisir Pantura hingga kawasan pegunungan di selatan.

Keberagaman wilayah hukum ini membuat Polres Kendal menghadapi dinamika keamanan yang kompleks. Di wilayah pesisir misalnya, permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan aktivitas perikanan, industri, serta arus lalu lintas Pantura yang padat. Sementara di wilayah pedesaan dan pegunungan, isu yang dihadapi lebih banyak terkait dengan akses pelayanan kepolisian. Dengan kondisi ini, Polres Kendal dituntut mampu membangun sinergi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

### **2.3.3 Visi dan Misi Polres Kendal**

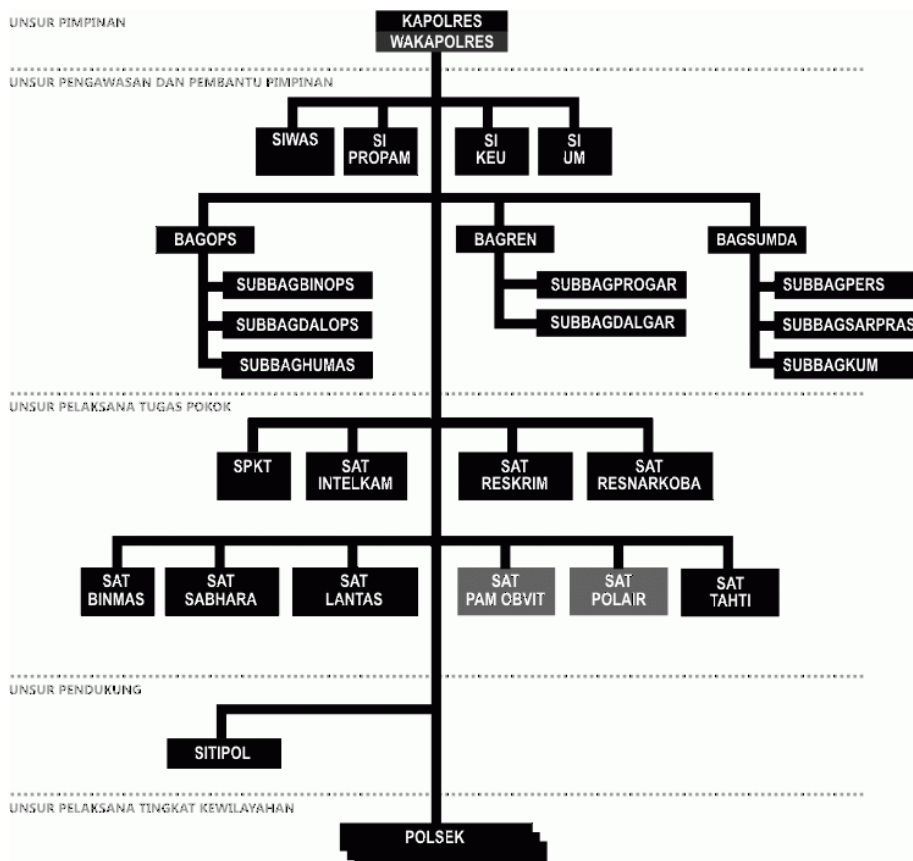
Sebagai lembaga publik, Polres Kendal memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Visi Polres Kendal adalah “Terwujudnya Kepolisian Resor Kendal beserta jajarannya yang profesional, unggul dan dipercaya masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas yang transparan dan bermoral guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.” Visi tersebut mencerminkan tekad Polres Kendal untuk membangun institusi yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Polres Kendal merumuskan sejumlah misi yang terarah. Pertama, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan tidak diskriminatif agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memelihara keamanan dan ketertiban dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ketiga, mengembangkan kemitraan melalui program Bhabinkamtibmas berbasis masyarakat yang patuh hukum. Keempat, menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kelima, mengelola seluruh sumber daya Polri secara profesional, transparan, dan bermoral. Keenam, menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam koridor hukum yang berlaku guna menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Kendal. Dengan visi dan misi tersebut, Polres Kendal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

### 2.3.4 Struktur Organisasi Polres Kendal

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Polres



Struktur organisasi Polri di tingkat kabupaten tercermin dalam organisasi Polres Kendal. Polres dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau Komisaris Besar Polisi (Kombes), yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres serta sejumlah pejabat utama yang membidangi berbagai fungsi. Bagian-bagian utama di Polres meliputi Bagian Operasional (Bag Ops), Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), Bagian Perencanaan (Bag Ren), dan Bagian Logistik (Bag Log). Selain itu terdapat satuan pelaksana fungsi seperti Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Narkoba (Satnarkoba), Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Samapta (Sabhara), dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Di samping itu, Polres Kendal juga memiliki unit pendukung seperti Seksi Humas, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), Seksi Pengawasan (Siwas), serta unit lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Secara struktural, Polres Kendal membawahi Polsek di tiap kecamatan. Kapolsek sebagai pimpinan Polsek bertanggung jawab kepada Kapolres dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Polsek merupakan garda terdepan Polri di masyarakat sehingga berperan penting dalam pelayanan langsung, deteksi dini, serta penyelesaian permasalahan di tingkat lokal. Dengan struktur organisasi yang demikian, Polres Kendal diharapkan mampu bekerja efektif dalam menjalankan fungsi

pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kendal.

Struktur organisasi Polres Kendal menunjukkan bahwa terdapat beberapa satuan fungsi yang saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Dalam penanganan kasus tawuran pelajar, Polres Kendal melibatkan sejumlah satuan utama yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda namun saling berkaitan. Penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, deteksi dini, pengamanan wilayah, serta koordinasi operasional antar satuan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada beberapa satuan yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan penanganan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal. Satuan-satuan tersebut dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki kewenangan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses penanganan kasus tawuran pelajar. Adapun satuan yang dimaksud meliputi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), serta Bagian Operasi (Bag Ops) serta dukungan dari Polsek di setiap kecamatan.

1. **Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)** merupakan unit yang berperan langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tawuran pelajar yang telah terjadi. Sat Reskrim bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi maupun pelaku, serta memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penanganan tawuran pelajar, Sat Reskrim menjadi pelaksana utama pada tahap represif, yaitu penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran pidana. Melalui proses penyidikan yang profesional, satuan ini berupaya mengungkap pelaku, mengamankan barang bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Sat Reskrim juga menghadapi berbagai kendala teknis dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Oleh karena itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal menjadi informan penting dalam penelitian ini karena memiliki informasi langsung mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar di Kabupaten Kendal.

2. **Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam)** memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di masyarakat, termasuk potensi tawuran pelajar. Sat Intelkam bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan situasi keamanan di wilayah hukum Polres Kendal. Informasi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, pemantauan di lapangan, maupun pengawasan aktivitas kelompok remaja di media sosial. Hasil analisis intelijen kemudian menjadi dasar bagi pimpinan kepolisian dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Sat Intelkam juga melakukan pemetaan wilayah rawan serta mengidentifikasi kelompok remaja yang berpotensi terlibat konflik. Dengan demikian, Kepala Satuan Intelkam dipilih sebagai informan

penelitian karena memiliki informasi mengenai pola pergerakan kelompok remaja serta potensi konflik yang dapat memicu terjadinya tawuran.

3. **Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)** memiliki fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk kepada kalangan pelajar. Sat Binmas melaksanakan berbagai program pembinaan seperti penyuluhan kamtibmas di sekolah, sosialisasi bahaya tawuran, serta pembinaan kepada remaja melalui kerja sama dengan pihak sekolah dan tokoh masyarakat. Fungsi satuan ini lebih menekankan pada upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya tawuran melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada pelajar, tetapi juga melibatkan guru, orang tua, serta lingkungan masyarakat sekitar. Melalui pendekatan tersebut diharapkan kesadaran hukum serta sikap disiplin di kalangan remaja dapat meningkat. Oleh karena itu, Kepala Satuan Binmas dipilih sebagai informan karena memiliki peran penting dalam menjelaskan upaya pencegahan dan pembinaan terhadap pelajar guna menekan potensi terjadinya tawuran.
4. **Satuan Samapta** merupakan satuan yang memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik serta merespons secara cepat berbagai gangguan kamtibmas. Sat Samapta melaksanakan kegiatan patroli rutin, pengamanan wilayah rawan, serta tindakan pengendalian apabila terjadi gangguan keamanan di masyarakat. Dalam kasus tawuran pelajar, anggota Samapta sering kali menjadi pihak

pertama yang hadir di lokasi kejadian untuk meleraikan bentrokan, mengamankan pelaku, serta mengevakuasi korban. Kehadiran cepat aparat kepolisian di lokasi kejadian menjadi salah satu indikator penting dalam menilai responsivitas kepolisian dalam menangani gangguan keamanan. Selain itu, Sat Samapta juga berperan dalam melakukan patroli pada waktu-waktu rawan terjadinya tawuran. Oleh karena itu, Kepala Satuan Samapta dipilih sebagai informan karena memiliki pengalaman langsung dalam penanganan tawuran pelajar di lapangan.

5. **Satuan Lalu Lintas (Satlantas)** memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kendal. Dalam konteks tawuran pelajar, Satlantas berperan dalam pengamanan jalan raya serta pengaturan lalu lintas ketika terjadi gangguan keamanan di ruang publik. Hal ini penting karena banyak kasus tawuran pelajar yang terjadi di ruas jalan umum, seperti jalan lingkar atau jalur pantura yang menjadi lokasi berkumpulnya kelompok remaja. Keberadaan tawuran di jalan raya tidak hanya menimbulkan konflik antar pelajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas turut terlibat dalam upaya pengamanan serta penanganan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tawuran tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki informasi mengenai dampak tawuran pelajar terhadap keselamatan lalu lintas serta upaya pengamanan yang dilakukan kepolisian di ruang publik.

6. **Bagian Operasi (Bag Ops)** memiliki tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian di tingkat Polres. Bag Ops berperan dalam menyusun strategi penanganan gangguan kamtibmas, termasuk dalam menangani fenomena tawuran pelajar yang melibatkan berbagai satuan fungsi. Dalam pelaksanaannya, Bag Ops mengoordinasikan kegiatan patroli, operasi kepolisian, serta pengamanan wilayah rawan yang melibatkan Sat Samapta, Satlantas, maupun satuan lainnya. Selain itu, Bag Ops juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi keamanan yang telah dilakukan. Peran koordinatif ini sangat penting agar penanganan tawuran pelajar dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Oleh karena itu, Kepala Bagian Operasi dipilih sebagai informan penelitian karena mengetahui strategi serta sinergi internal kepolisian dalam penanganan kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal.
7. Selain satuan-satuan tersebut, Polsek di tiap kecamatan juga berperan besar sebagai ujung tombak Polri di tingkat lokal. Polsek melaksanakan fungsi deteksi dini dan penanganan awal terhadap potensi tawuran yang muncul di wilayah hukumnya. Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas aktif menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa untuk mengawasi dinamika remaja di lingkungan masing-masing. Dengan kedekatan wilayah dan hubungan langsung dengan masyarakat, Polsek menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas kinerja Polres Kendal secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keterlibatan berbagai satuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tawuran pelajar di Kabupaten Kendal dilakukan melalui pendekatan yang terpadu. Sat Intelkam berperan dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini, Sat Binmas melakukan upaya pembinaan dan pencegahan, Sat Samapta melakukan pengamanan dan respons cepat di lapangan, serta Sat Reskrim melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran. Sementara itu, Satlantas berperan dalam menjaga keselamatan lalu lintas serta mengamankan lokasi kejadian di jalan raya, dan Bag Ops bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional penanganan tawuran antar satuan fungsi. Sementara Polsek menjadi garda terdepan dalam memantau dan mengendalikan situasi di tingkat kecamatan. Sinergi ini mencerminkan pola kerja Polres Kendal yang prediktif, preventif, dan represif, yang menjadi dasar penting dalam menilai kinerja kepolisian dalam menangani kasus tawuran pelajar di Kabupaten Kendal. Sinergi tersebut mencerminkan pola kerja kepolisian yang bersifat prediktif, preventif, dan represif. Pola kerja tersebut menjadi dasar penting dalam menilai kinerja Polres Kendal dalam menangani kasus tawuran pelajar di wilayah Kabupaten Kendal.